



KONTEKS SOSIAL DAN KONTEKS SEJARAH DALAM NOVEL *SENJA DI JAKARTA* KARYA MOCHTAR LUBIS: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA GEORG LUKACS

Diva Mayriskha ^{a,*}, Astuty ^{b,*}, Liana Shinta Dewi ^{c,*}

^{abc} Universitas Tidar

Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Surel: divamay08@gmail.com

Diterima Redaksi: 1 Agustus 2023 | Selesai Revisi: 19 Desember 2023 | Diterbitkan: 22 Desember 2023

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konteks sosial dan konteks sejarah yang muncul dalam kalimat pada novel *Senja di Jakarta* dan mengandung peristiwa sejarah yang pernah dialami Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh deskripsi konteks sosial dan konteks sejarah yang terdapat dalam novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian konteks sosial dan konteks sejarah. Data yang digunakan berupa kata, frasa, kalimat, dan wacana sedangkan sumber penelitian yang digunakan ialah novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis. Hasil penelitian ini ditemukan tiga bentuk konteks sosial yaitu aspek sosial politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Aspek sosial politik terdapat lima kategori, aspek ekonomi terdapat enam kategori, aspek sosial budaya terdapat empat kategori. Konteks sejarah terdapat lima kategori yang meliputi, tentara KNIL, masa pendudukan Jepang, penyerahan kekuasaan oleh Belanda kepada RIS dan NICA, perdebatan wilayah Irian Jaya di PBB, dan pengkhianatan orang Indonesia yang mendukung NICA. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran sastra jenjang SMA kelas XI.

Kata-Kata Kunci: konteks sejarah, konteks sosial, novel *Senja di Jakarta*, sosiologi sastra Georg Lukacs

Abstract: This research is motivated by the phenomena of the social context and historical context that appear in sentences in the novel *Senja di Jakarta* and contain historical events that have been experienced by Indonesia. The purpose of this study is to obtain a description of the social context and historical context contained in the novel *Senja di Jakarta* by Mochtar Lubis. This study uses a qualitative descriptive analysis with social context and historical context research subjects. The data used are in the form of words, phrases, sentences, and discourse while the research source used is the novel *Senja di Jakarta* by Mochtar Lubis. The results of this study found three forms of social context, namely socio-political aspects, economic aspects, and socio-cultural aspects. There are five categories of socio-political aspects, six categories of economic aspects, and four categories of socio-cultural aspects. The historical context contains five categories which include KNIL troops, the Japanese occupation, the handover of power by the Dutch to RIS and NICA, the debate over the Irian Jaya region at the United Nations, and the betrayal of Indonesians who supported NICA.



Key Words: historical context, social context, *Senja di Jakarta* novel, sociology of literature Georg Lukacs

A. PENDAHULUAN

Karya sastra menjadi cerminan peristiwa yang terjadi di masyarakat pada zaman pengarang menciptakannya. Penciptaan karya sastra yang baik dapat mencerminkan keadaan realistik dalam kalangan masyarakat. Salah satu penciptaan karya sastra yang mencerminkan keadaan realistik terjadi di kalangan masyarakat yaitu novel. Kelahiran novel tidak bisa lepas dari pengarangnya sebagai pencipta karya sastra. Menurut Lukacs, seorang dapat dikatakan sebagai pencipta karya sastra realis sejati apabila mampu mengungkapkan pandangan penulis dengan kenyataan hidup sosial masyarakat sehari-hari (Karyanto, 1997, p.36). Artinya, novel tidak bisa dilepaskan dari pengarangnya karena novel digunakan sebagai media oleh pengarang untuk menyampaikan idenya.

Menurut Lukacs (Karyanto, 1997, p.37) pengarang merupakan seseorang yang berkembang bersama lingkungan sosialnya yang terus berubah. Oleh karena itu, pengarang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Kenyataan tersebut tidak hanya terjadi pada satu waktu, tetapi bergerak secara terus-menerus setiap harinya. Sejatinya masyarakat tidak dapat lepas dari sejarah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Lukacs (Kuntowijoyo, 1995, p.133) bahwa novel sosial sama halnya dengan novel sejarah yaitu menggunakan peristiwa sejarah sebagai bahan penciptaan karya. Penciptaan karya tersebut dapat dianggap sebagai peristiwa sosial pada saat pengarang menciptakan karyanya, tetapi dapat dianggap sebagai peristiwa sejarah bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, novel sebagai karya sastra mampu menjadi dokumen sejarah. Dokumen sejarah tersebut dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat pada zaman lampau. Sejarah dan sastra tersebut mencerminkan peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat itu.

Konteks sejarah melatarbelakangi pengarang dalam menciptakan novel pada masanya. Pembaca juga dapat mengetahui alur pemikiran masyarakat pada zaman tertentu melalui karya sastra novel tersebut. Selain itu, konteks sejarah dalam karya sastra mampu menggambarkan peristiwa sejarah yang tidak dipelajari di bangku sekolah dan tidak juga tertulis dalam buku-buku sejarah.

Novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis menggambarkan sejarah atau peristiwa sejarah tentang kehidupan politik dan sosial di Jakarta selama kurun



waktu 1950-an. Peristiwa ini juga pernah terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta. Isi novel *Senja Di Jakarta* ini terdiri dari delapan bagian. Bagian-bagian tersebut memuat laporan kota yang dimulai dari bulan Mei hingga bulan Desember. Laporan kota ini menampilkan setiap kejahatan yang mengalir deras di Jakarta tahun 1950-an. Fokus dari novel ini terutama pada kehidupan politik Jakarta tahun 1950-an.

Keadaan Indonesia dalam novel *Senja Di Jakarta* digambarkan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Raden Kaslan dan kawan-kawannya memanfaatkan bisnis mereka untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan korupsi, kaum intelektual berdiskusi akan hal tersebut, berdebat tentang ideologi yang mereka pegang, rakyat kelas bawah diwakili oleh Saimun, Itam, Pak Ijo (kusir tua) dan istrinya yaitu Neneng hidup dalam garis kemiskinan. Gambaran kehidupan sosial ekonomi rakyat kelas bawah sangat timpang dengan kehidupan pemegang kekuasaan.

Kehidupan sosial ekonomi di Jakarta pada saat itu semakin kacau. Surat kabar oposisi membongkar kecurangan partai yang sedang berkuasa. Terbongkarnya bisnis lisensi impor milik Raden Kaslan ini menyebabkan dirinya dipanggil polisi. Suryono bersama ibu tirinya berniat untuk kabur, akan tetapi mereka mengalami kecelakaan di kawasan puncak.

Berdasarkan fakta-fakta sejarah yang tergambar dalam novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis, novel ini memiliki potensi untuk dianalisis menggunakan tinjauan sosiologi sastra Georg Lukacs. Hal ini karena dapat dilihat dari konteks sosial dan latar belakang pengarang pada masa pengarang mencipta novel dan penggambaran peristiwa sejarah di dalamnya. Mochtar Lubis dalam menggambarkan peristiwa dan tokoh-tokoh dalam novel menggunakan konteks sosialnya dengan keadaan masyarakat pada masa itu dan saat ini novel yang ditulisnya mengandung konteks sejarah. Dalam penggambarannya, Mochtar Lubis tidak secara terang-terangan menyindir pemerintahan pada masa itu, tetapi dia mengolahnya dengan bahasa dan peristiwa yang hampir sama dengan realitas masyarakat pada zaman tersebut.

B. LANDASAN TEORI

Konteks Sosial Menurut Georg Lukacs

Konteks sosial selalu berkaitan dengan masyarakat sebagai makhluk sosial dan saling bergantung satu sama lain. Konteks sosial dalam teori Lukacs yaitu seni atau karya sastra yang diciptakan mampu membuat pembaca terlibat dengan



persoalan sosial yang terjadi dan digambarkan dalam setiap karya sastra (Karyanto, 1997, p.48).

Karya sastra diciptakan sebagai refleksi dari kehidupan masyarakat dan sejauh mana karya sastra mampu mencerminkan kehidupan masyarakat pada zamannya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Baihaqi (2015, p.61) bahwa karya sastra tidak dapat dipahami dan diteliti terlepas dari dunia pembaca karena karya sastra merupakan salah satu wujud realisasi diri seorang pembaca yang memberikan konkretisasi terhadap ruang-ruang kosong yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri. Dalam konteks sosial ini, terdapat faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi karya sastra. Faktor - faktor sosial tersebut di antaranya.

1. Aspek Sosial Politik

Menurut Lukacs (Karyanto, 1997, p.32) politik adalah perwujudan dari kesadaran kelas proletar, buruh, dan petani. Artinya, dalam aspek politik menurut Lukacs, pengarang mampu menyampaikan idenya sebagai wujud dari kesadaran terhadap tindakan yang dialami oleh kelas proletar, buruh, dan petani. Hal tersebut penting karena pengarang yang realis mampu menyadarkan kelas proletar, buruh, dan petani dari penindasan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Sistem kekuasaan dalam berpolitik terkadang disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Lukacs menggambarkan (Karyanto, 1997, p.15) bahwa realitas sosial yang terjadi di lingkungan pengarang terbentuk oleh kebiasaan berpolitik pada zamannya. Dalam hal tersebut, berarti pengarang dalam menciptakan karya sastra menyisipkan aspek politik yang terjadi pada zamannya.

Lukacs dalam teorinya memfokuskan pada semangat realisme sosialis pada zamannya. Gagasan dasar realisme sosialis Georg Lukacs adalah membebaskan manusia terutama kaum proletariat dari belenggu kaum borjuis yang mengikat mereka atas nama kekuasaan, sehingga mereka tidak merdeka bahkan terjajah (Karyanto, 1997, p.8). Kepentingan politik dan kekuasaan dari kaum borjuis menjadi inti utama yang dibahas dalam realisme sosialis. Ranah yang menjadi dasar dari realisme sosialis adalah penggambaran masyarakat sebagai inspirasi untuk membuat karya sastra. Konsep realisme Lukacs (Karyanto, 1997, h.15) yaitu setiap individu atau masyarakat mampu menjadi dirinya sendiri dan merdeka tanpa terbelenggu penderitaan dari apapun dan siapapun bahkan oleh sistem kekuasaan sekalipun.



2. Aspek Ekonomi

Menurut Khoiruyah, Sutrimah, & Noeruddin (2021) aspek ekonomi adalah aspek yang berkaitan dengan kelas sosial manusia dan berkaitan dengan penghasilan masyarakat atau kekayaan. Menurut Lukacs (Karyanto, 1997, p.85) dalam sistem kapitalis membuat kelas pekerja tidak dapat menentukan pekerjaannya. Bahkan, manusia menjadi alat dari pekerjaan. Tingkat kemampuan hanya diukur dari uang. Kehadiran uang memecahkan masyarakat ke dalam kotak-kotak kelas yaitu kelas pemilik modal dan kelas tidak memiliki modal.

Pengotakan kelas tersebut menciptakan ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat bawah (proletar) dengan pemegang kekuasaan (borjuis). Lukacs sangat serius dalam memberikan perhatian tentang kesadaran terutama dalam konteks kelas proletar. Lukacs (Karyanto, 1997, p.78) mengatakan kesadaran adalah tahapan yang menjadi kekuatan manusia dalam mengantarkan pada pemahaman keberadaannya. Kesadaran tersebut akan mendorong manusia terutama kaum proletar pada hak-hak yang seharusnya diperoleh setelah mereka melakukan kewajiban.

Kesadaran kelas dalam masyarakat borjuis terdapat dua kelas yaitu kelas borjuis dan kelas proletariat (Lukacs, 2020, p.119). Secara ideologis maupun ekonomis, kelas borjuis dan kelas proletar saling bergantung satu sama lain. Kelas proletariat menyediakan tenaga untuk kelangsungan proses produksi dan kelas borjuis sebagai penyedia faktor produksi. Tetapi, sebagai penyedia faktor produksi, kelas borjuis tidak jarang bersikap sewenang-wenang terhadap kelas proletar.

Menurut Lukacs masyarakat kapitalis telah melakukan reduksi nilai pekerjaan terhadap kaum pekerja (Karyanto, 1997, p.58). Sistem budaya kelas kapitalis membuat kelas pekerja tidak bebas dalam menentukan pekerjaannya. Kelas pekerja bagi kelas kapitalis dianggap sebagai alat dari pekerjaan dan hanya diukur dengan uang sebagai alat tukar. Adanya sistem tersebut membuat manusia merasa terasingkan. Kehadiran uang memberi jarak pada masyarakat dan menjadikan masyarakat terbagi ke dalam kotak-kotak kelas. Lukacs (Karyanto, 1997, p.58) mengatakan kotak-kotak kelas tersebut yaitu kelas pemilik (modal) uang dengan kelas tidak memiliki uang (modal). Akibat dari pengotakan kelas tersebut adalah eksploitasi yang dilakukan kelas pemilik modal atas kelas tak bermodal (proletar).

3. Aspek Sosial Budaya

Menurut Lukacs teori estetika ada dua jenis yaitu bentuk (*form*) dan jiwa (*sou*) seni. Lukacs menganggap bentuk karya seni sebagai ungkapan irasional. Seni



muncul dari desakan kondisi realitas yang dianggapnya masih personal. Menurut Lukacs, kebudayaan dapat dilihat sebagai produk kreatif subjektif, tetapi bentuk kebudayaan yang sama sekaligus menjadi penghambat kreativitas manusia sendiri. Adanya hambatan tersebut memunculkan ketegangan yang akan menambah kreativitas manusia. Oleh karena itu, proses kreativitas manusia tidak dapat dibendung. Proses perkembangan budaya yang penuh dengan ketegangan itu disebut tragedi kebudayaan (Karyanto, 1997, p.26).

Menurut Lukacs, karya sastra sebagai bagian dari kebudayaan mencerminkan budaya yang merupakan sistem sosial dari kehidupan sehari-hari. Karya sastra termasuk seni digunakan oleh kaum kapitalisme sebagai ladang uang. Seni dalam cengkeraman kaum kapitalis tidak lagi memiliki makna untuk mengungkap kebenaran. Seni menjadi barang komoditi, hasil negosiasi pemilik modal dengan seniman atau dalam konteks ini pengarang (Karyanto, 1997, p.65).

Menurut Lukacs pada teori seninya (Karyanto, 1997, p.10) seni yang realis diciptakan berdasarkan hubungan antara objek satu dengan objek lainnya dan saling berkaitan. Objek dan lingkungan masyarakat tersebut harus mampu dipahami dengan baik oleh pengarang pada saat mencipta karya sastra. Hal tersebut berkaitan dengan teori yang diutarakan Lukacs bahwa karya seni yang indah mampu mengungkap kebenaran realitas (Karyanto, 1997, p.36).

Konteks Sejarah

Kochhar (2008) menjelaskan bahwa sastra mempresentasikan kondisi masyarakat sehingga karya sastra mampu mengungkap hal-hal yang tidak tertulis pada fakta baku dalam sejarah. Bachtiar (2016) mengatakan bahwa karya sastra selalu dikaitkan dengan fiksi yang imajinatif, sedangkan sejarah tidak dapat dipisahkan dari fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut untuk menemukan kebenaran masa lalu dan realitas yang terdapat di dalamnya, sehingga sejarah dan sastra sering dianggap dalam tataran yang sama.

Wildan, Harun, & Safrida (2015) mengatakan bahwa fakta sejarah mampu menjadi sarana bagi penulis untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan tanggapan dalam pembuatan novel. Sejarah dituliskan kembali dengan suatu cerita yang mengisahkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau sesuai dengan pengetahuan dan kronologis sejarah.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konteks sejarah penggambaran pengarang terhadap peristiwa yang pernah terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi fakta sejarah bagi generasi berikutnya dan dituliskan dalam karya sastra yaitu novel.



C. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, analisis kritis, Upaya penyelidikan dan pemeriksaan menyuruh. Metode pengumpulan data menggunakan metode *close reading* dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik catat. Metode *close reading* dapat dilakukan dengan langkah (1) membaca cepat atau membaca sekilas novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis; (2) membaca novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis dengan kerangka teori sosiologi sastra Georg Lukacs; (3) mencatat dan memindai hal-hal yang terkait dengan kerangka teori sosiologi sastra Georg Lukacs; (4) pengodean data; (5) reduksi data. Metode analisis data menggunakan deskripsi analisis dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu sebagai berikut: (1) memetakan dan menafsirkan deskripsi konteks sosial yang terdapat dalam novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis menggunakan teori sosiologi sastra Georg Lukacs; (2) memetakan dan menafsirkan deskripsi konteks sejarah yang terdapat dalam novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis menggunakan teori sosiologi sastra Georg Lukacs; (3) menarik kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Konteks sosial dalam teori Lukacs, merupakan seni atau karya sastra yang diciptakan mampu membuat pembaca terlibat dengan persoalan sosial yang terjadi dan digambarkan dalam setiap karya sastra. Karya sastra diciptakan sebagai refleksi dari kehidupan masyarakat dan sejauh mana karya sastra mampu menciptakan kehidupan masyarakat pada zamannya. Novel berjudul *Senja Di Jakarta* karya Mochtar Lubis merupakan karya sastra yang mengandung konteks sosial di dalamnya. Konteks sosial ini digunakan oleh pengarang yaitu Mochtar Lubis untuk merefleksikan kehidupan masyarakat Jakarta pada tahun 1950-an. Konteks sosial tersebut terdiri dari aspek sosial politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Adapun uraian analisis mengenai bentuk tindak tutur direktif dalam novel *Senja Di Jakarta* karya Mochtar Lubis adalah sebagai berikut.

1. Aspek Sosial Politik

Data 1 :

“Dewan pimpinan telah mengambil keputusan penting. Sebagai Saudara tahu, pemilihan umum sudah dekat. Partai kita perlu banyak uang. Kita perlu mengadakan organisasi dagang untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Di antara anggota-anggota kita semua, maka



Saudara terpilih untuk membuat rencana ini, karena Saudara sejak lama sudah bergerak dalam dunia perdagangan ini. Saudara buatlah rencana yang sungguh-sungguh besar, meliputi seluruh kegiatan perekonomian. Soal uang Saudara jangan hiraukan. Kita tidak bermaksud akan berdagang sungguh-sungguh. Akan tetapi jika di antara usaha ini ada yang bisa jadi permanen, tentu lebih baik lagi. Anggota-anggota kita yang memegang kekuasaan telah mendapat instruksi untuk membantu usaha partai ini. Bagaimana pikiran Saudara?”

(SDJ/KSS/PT/61)

Data 1 tersebut merupakan konteks sosial politik. Konteks sosial politik tersebut terdapat dalam kalimat yang dikatakan oleh Husin Limbara. Husin Limbara adalah pimpinan Partai Indonesia. Husin Limbara menjadi koordinator partai dan bertanggung jawab terhadap partai. Dia juga memegang kuasa penuh untuk merencanakan segala hal untuk kepentingan partai.

Rencana yang dia buat tidak mementingkan baik atau buruknya, dia hanya mementingkan tujuannya sendiri dan tujuan partai. Kalimat tersebut yaitu “pemilihan umum sudah dekat. Partai kita perlu banyak uang”. Husin Limbara memerlukan uang banyak untuk persiapan pemilu. Harapan Husin Limbara adalah partainya bisa untuk memenangkan pemilu tersebut. Husin Limbara juga merencanakan untuk menciptakan perusahaan fiktif yang bergerak di bidang perekonomian. Hal tersebut tergambar dalam kalimat “Saudara buatlah rencana yang sungguh-sungguh besar, meliputi seluruh kegiatan perekonomian”.

Adanya kegiatan pemilihan umum yang sudah di depan mata, membuat partai membutuhkan dana banyak. Pendanaan dari pemerintah saja tidak mencukupi untuk membiayai partai sampai menjelang pemilihan umum, ditambah lagi dengan ambisi untuk memenangkan pemilihan umum. Partai membuat manusia-manusia di dalamnya menjadi manusia yang tidak utuh. Terbukti dari data 3 tersebut, bahwa Husin Limbara melakukan berbagai macam usaha untuk mengumpulkan dana. Husin Limbara sebagai manusia di dalam partai sudah menjadi manusia yang tidak utuh lagi karena partainya membutuhkan dana. Husin Limbara dan anggota partai lainnya terpaksa untuk bersifat koruptif atau manusia yang mencuri, nepotisme, dan menggadaikan harga dirinya demi uang.

Hal tersebut sejalan dengan sejarah politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlangsung



tahun 1959 – 1965. Demokrasi terpimpin pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di sidang konstituante tanggal 10 November 1956 (Widariyanti, 2022). Adanya demokrasi terpimpin diakibatkan karena banyak permasalahan pada masa sebelumnya yaitu demokrasi liberal. Permasalahan tersebut diantaranya gerakan separatism, pertumbuhan ekonomi terganggu akibat pergantian kabinet, konflik antar partai politik, dan gagalannya anggota konstituante dalam menyusun UUDS baru (Sholehuddin & Kasdi, 2015, h.69).

Pendanaan partai politik menjadi salah satu permasalahan pada masa demokrasi terpimpin maupun masa sekarang. Arliman (2016) mengatakan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, membutuhkan banyak dana, di antaranya untuk pencetakan surat suara, melibatkan anak dalam kampanye, surat suara yang fiktif, *black campaign*, serangan fajar dan hal lain sebagainya. Hal tersebut sudah dilarang dan tercantum dalam perundang-undangan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, legislatif, dan Pilkada. Adanya kegiatan tersebut dapat menciptakan praktik pencucian uang dari hasil korupsi untuk membiayai kampanye para calon di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Arliman (2016) mengatakan bahwa fakta menunjukkan demokrasi Indonesia dibajak oleh kepentingan modal dan kekuasaan. Praktik politik uang dan tindakan politis mendominasi pelaksanaan pemilihan umum. Kegiatan operasi pembajakan demokrasi melibatkan dana hingga puluhan miliar rupiah.

Perhitungan berdasarkan macam-macam pengeluaran dan segala keperluan kontestasi kandidat, biaya pencalonan, tim pemenangan, survei, atribut kampanye, sumbangan ke kantong pemilih, membeli suara, kampanye di media cetak dan elektronik, hingga menyiapkan saksi pemungutan suara. Pengeluaran yang sangat banyak tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang bakal diterima. Hal inilah yang menyebabkan pada manusia dalam partai politik menjadi “jahat” untuk mengeruk dan menguras habis tanpa sisa pundi-pundi kesejahteraan rakyat (Santoso & Tim Perludem, 2012).

Konsep demokrasi terpimpin menyebabkan manusia menjadi tidak utuh karena para penguasa dalam sistem kekuasaan ingin mengunggulkan diri mereka masing-masing. Masyarakat tersiksa bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi dari berbagai segi salah satunya kebudayaan. Konsep demokrasi terpimpin yaitu jalannya pemerintahan berpusat pada keputusan kepala negara atau presiden. Presiden yang sedang menjabat pada masa itu adalah Soekarno. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin juga terletak pada TNI AD dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai tersebut merupakan salah satu dari empat partai besar yaitu NU, Masyumi, PNI, dan didukung penuh oleh Soekarno.



Adanya dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi anggota partai untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Keterlibatan partai tersebut dalam demokrasi terpimpin ditunjukkan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang budaya.

Keterlibatan dalam bidang budaya di antaranya adalah perkembangan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Tujuan dibentuknya Lekra yaitu sebagai alat politik untuk menarik simpati rakyat kecil. Situasi politik saat itu semakin menguntungkan Lekra untuk bersikap agresif terhadap lawan-lawan politiknya dengan polemik keras di berbagai surat kabar dan majalah. Polemik yang semakin berkembang tersebut menjadi teror budaya dan mendorong seniman lain untuk menentang lekra. Pertentangan tersebut melatar belakangi lahirnya Manifes Kebudayaan (Widariyanti, 2022).

Konsep dari manifes kebudayaan yaitu para seniman dan sastrawan menentang politik kebudayaan Lekra yang dinilai tidak manusiawi. Seni tidak boleh terikat dengan ideologi politik mana pun. Setiap individu manusia memiliki haknya dan kebebasan dalam berkesenian. Hal tersebut sesuai dengan data 2 yang menyatakan bahwa nasib setiap individu tidak ditentukan oleh sistem kekuasaan mana pun, akan tetapi ditentukan oleh masing-masing individu. Artinya, individu harus mampu menjadi makhluk utuh tanpa dijadikan alat politik oleh pihak mana pun. Manusia yang utuh adalah manusia tersebut mampu untuk hidup dengan bebas, bukan individu yang terkekang dan terpecah-pecah mengikuti ketegangan politik. Tiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.

Data 2 :

“Sesungguhnya tidak sukar,” kata Raden Kaslan, “lisensi impor, apalagi lisensi barang-barang langsung menjadi kebutuhan rakyat, orang berani beli sampai dua ratus persen. Jadi kalau umpamanya harga seluruh lisensi seratus ribu rupiah, maka bisa dijual sampai tiga ratus ribu rupiah, Dan kita dapat tiga ratus ribu rupiah bersih tanpa keluar ongkos satu sen!”

(SDJ/KSS/PT/62)

Data 2 tersebut merupakan konteks sosial politik. Konteks sosial politik tersebut terdapat dalam kalimat yang dikatakan oleh Raden Kaslan. Raden Kaslan merupakan direktur NV “Bumi Ayu” dan anggota Partai Indonesia. Raden Kaslan sebagai anggota Partai Indonesia ikut membantu Husin Limbara untuk mencapai tujuan partai yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.



Rencana yang diusulkan oleh Raden Kaslan tersebut berupa perdagangan lisensi impor barang kebutuhan pokok rakyat. Hal tersebut ditunjukkan pada kalimat “lisensi barang-barang langsung menjadi kebutuhan rakyat, orang berani beli sampai dua ratus persen”. Raden Kaslan memiliki rencana untuk menaikkan harga-harga barang kebutuhan pokok rakyat melalui lisensi impor. Keuntungan hasil lisensi impor tersebut akan dimasukkan ke dana partai dan pribadi.

Partai yang membutuhkan uang akan membuat anggotanya bersifat koruptif. Korupsi yang dilakukan anggota partai Husin Limbara yaitu dengan lisensi impor kebutuhan pokok masyarakat dan mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif. Adanya rencana tersebut disebabkan karena kebutuhan dana menjelang pemilihan umum. Pemimpin dan anggota-anggota partai menjadi alat partai untuk mencapai tujuan bersama yaitu memenangkan pemilihan umum tanpa kekurangan dana.

Kenaikan lisensi impor menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok naik dan rakyat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sanusi (2009) mengatakan bahwa fakta politik di Indonesia pada masa orde lama hadirnya semua pejabat sebagai komisaris pada perusahaan konglomerat. Korupsi pada masa orde lama adalah masalah perbedaan penghasilan dalam jenjang kepangkatan, artinya masalah keadilan di antara para pelakunya yaitu elit penguasa.

Data 2 tersebut merupakan akibat dari kebutuhan partai yang mendesak saat menjelang pemilihan umum. Faktanya yaitu dana yang diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk menutup biaya partai menjelang pemilu. Akibatnya, orang-orang partai melakukan korupsi. korupsi yang dilakukan yaitu orang-orang partai dengan menggandeng pemegang kekuasaan lain seperti halnya Raden Kaslan. Raden Kaslan merupakan seorang anggota partai dan konglomerat dengan banyak perusahaan yang dia miliki. Raden Kaslan sebagai pemegang kekuasaan mampu menggerakkan sektor perekonomian bidang lisensi impor untuk mengumpulkan dana partai menjelang pemilu.

2. Aspek Ekonomi

Data 3 :

“Pagi itu, ketika Saimun, kuli sampah, sedang mendorongkan keranjang sampah di tempat pembuangan sampah, dalam hujan gerimis, Dalam kamar agak samar-samar terang, dan sebentar Suryono berbaring diam-diam, memperhatikan kamarnya, lalu dia teringat pada kamarnya di New York. Tiga bulan yang lalu dia masih



di New York, kota raksasa itu. Dan sekarang, tiga bulan kemudian, dia telah di Jakarta kembali. Masih canggung dia rasanya tinggal di Jakarta setelah bekerja tiga tahun lamanya di luar negeri. Banyak terasa padanya kekurangan di Jakarta.”

(SJ/KSS/EK/9)

Data 3 tersebut merupakan konteks sosial aspek ekonomi. Konteks sosial aspek ekonomi tersebut tergambar pada wacana yang disampaikan pengarang. Mochtar Lubis sebagai pengarang menggambarkan perbedaan kelas sosial berdasarkan ekonomi. Kehidupan masyarakat kelas bawah dengan kehidupan kelas atas menjadi sorotan Mochtar Lubis dalam menulis novel *Senja Di Jakarta*. Konteks ekonomi di atas merupakan penggambaran perbedaan kelas yang sangat kontras.

Perbedaan kelas tersebut mengakibatkan adanya pengotakan kelas di antara masyarakat. Pengotakan kelas tersebut yaitu masyarakat kelas bawah (kaum proletar) dengan masyarakat kelas atas atau pemegang kekuasaan (kaum borjuis). Berdasarkan wacana tersebut Saimun dan Itam yang memiliki pekerjaan sebagai kuli pengangkut sampah termasuk golongan kaum proletar, sedangkan Suryono termasuk golongan kaum borjuis. Wacana tersebut menggambarkan dua kegiatan yang sangat kontras dalam satu waktu.

Kegiatan yang dilakukan oleh Saimun dan Itam sebagai kuli pengangkut sampah sedang bekerja keras mengangkut sampah dalam keadaan gerimis. Hal tersebut tergambar dalam kalimat “Pagi itu, ketika Saimun, kuli sampah, sedang mendorong keranjang sampah di tempat pembuangan sampah, dalam hujan gerimis,”. Kehidupan berbeda yang sangat kontras terjadi pada Suryono yang masih terbaring di ranjang tempat tidurnya sambil mengingat-ingat kehidupan mewahnya di New York. Kehidupan mewah Suryono dengan pengalamannya bekerja di New York selama tiga tahun sangat kontras dengan kehidupan Saimun dan Itam. Suryono hidup dengan serba kecukupan, sedangkan Saimun dan Itam harus bekerja sebagai kuli dengan serba kekurangan. Bahkan, Suryono merasa kekurangan hidup di Jakarta.

Hal tersebut seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan orde lama. Zahiroh (2020) menyampaikan bahwa pada masa pemerintahan orde lama terdapat organisasi *underbow* PKI yang diberi nama Barisan Tani Indonesia (BTI). Pergerakan BTI di Jawa Timur menimbulkan berbagai konflik di antaranya penganiayaan, penghinaan agama, serta secara langsung. BTI melakukan kekerasan terhadap kaum ulama dan santri, selain itu BTI juga membuat kondisi politik Indonesia semakin keruh. Alasan BTI



melakukan tindakan kekerasan hingga membunuh kaum ulama karena perbedaan kelas sosial di antara keduanya.

Anggota BTI tidak terima dengan kepemilikan tanah para ulama yang menyebar luas. Peristiwa besar terjadi di pondok pesantren Gontor pada tahun 1967. Pondok pesantren Gontor memiliki tanah kurang lebih seluas 200 hektar yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tanah tersebut dikuasai oleh anggota BTI. Anggota partai tersebut pada masa itu menguasai tanah dan menggarap tanah pondok pesantren Gontor, akan tetapi tidak mau menyetorkan hasilnya ke Gontor karena merasa memiliki. Hal tersebut menyebabkan sengketa tanah antara pemilik yayasan dengan Barisan Tani Indonesia (BTI). Kelas sosial yang disebabkan adanya kesenjangan ekonomi menyebabkan para anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) berani bertindak melampaui batas.

Data 4 :

Udin, Hermanto, dan Bambang telah seperempat jam lamanya menunggu-nunggu di kantor Serikat Buruh Pelayaran Seluruh Indonesia di Tanjung Priok. Tiga hari yang lalu mereka menyampaikan pengaduan kepada pengurus besar, bahwa anggota-anggota mereka semuanya mendesak agar serikat sekerja segera mengambil tindakan untuk memperbaiki nasib buruh. Upah telah ternyata sejak beberapa bulan tidak mencukupi lagi, sedang harga-harga keperluan hidup terus meningkat. Mula-mulanya kepada buruh oleh pemimpin serikat sekerja dikatakan supaya bersabar, karena pemerintah kini sedang menjalankan program untuk memperbaiki nasib rakyat, dan tuntutan naik upah tidak akan meringankan penderitaan buruh. Malahan jika upah dinaikkan, maka harga barang-barang juga akan ikut naik, dan yang akan menderita nanti ialah buruh sendiri. Sebab itu, tuntutan sebenarnya ialah mengajak pemerintah untuk menurunkan harga-harga.

(SDJ/KSS/EK/106)

Data 4 tersebut merupakan konteks sosial aspek ekonomi. Konteks sosial aspek ekonomi tersebut terdapat pada wacana pengarang. Mochtar Lubis sebagai pengarang menyampaikan keadaan di sekitarnya melalui tokoh Udin, Hermanto, dan Bambang sebagai wakil para buruh. Mochtar Lubis menggambarkan perjuangan nasib kaum buruh melalui tokoh Udin, Hermanto, dan Bambang. Udin, Hermanto, dan Bambang memperjuangkan nasib kaum buruh. Mereka melakukan pengaduan kepada anggota besar, akan tetapi tidak membuahkan hasil.



Mereka menyampaikan pengaduan terkait kesejahteraan perekonomian rakyat berupa upah kaum buruh dan kenaikan harga-harga yang terus meningkat. Pemimpin serikat sekerja hanya meminta mereka untuk bersabar karena pemerintah sedang memperbaiki nasib dan kesejahteraan rakyat. Alih-alih upah dinaikkan, akan tetapi hal tersebut membuat buruh semakin menderita dikarenakan jika upah naik maka harga-harga pun ikut naik. Maka solusinya adalah mengajak pemerintah untuk menurunkan harga-harga.

Hal tersebut seperti yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan orde lama kepemimpinan Presiden Soekarno. Hadi (2021) menjelaskan sejarah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang menjadi titik balik pergantian rezim dari orde lama ke orde baru. Awal dari adanya Tritura adalah adanya peristiwa 30 September (G30S) 1965. Protes pun terjadi di kalangan mahasiswa. Isi dari Tritura yaitu (1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI; (2) Rombak Kabinet Dwikora; dan (3) Turunkan Harga. Tuntutan yang sesuai dengan data 19 yaitu terkait tuntutan penurunan harga-harga. Presiden Soekarno dinilai mengalami kesalahan fatal terkait kebijakan ekonomi. Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965.

Mochtar Lubis sangat kritis dalam mengungkapkan pandangannya dengan kenyataan sosial yang terjadi di sekitarnya. Hal-hal yang disampaikan Mochtar Lubis dalam wacananya pada data 19 ini sesuai dengan keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama. Buruh menuntut kenaikan upah dan menurunkan harga-harga pernah terjadi di Indonesia dengan aksi demo para buruh. Mochtar Lubis melalui wacananya tersebut juga menggerakkan lingkungannya untuk tidak terpaku pada keputusan pemerintah yang akan membuat mereka menderita. Mochtar Lubis menyadarkan bahwa nasib rakyat terutama kaum buruh harus diperjuangkan kesejahteraan kaum buruh. Kaum buruh berhak sejahtera tanpa ikatan belenggu yang mengeksploitasi mereka.

3. Aspek Sosial Budaya

Data 5 :

Mengingat istrinya Halim tersenyum. Dia ingat betapa beberapa minggu yang lalu sebelum dia diangkat menjadi anggota parlemen istrinya bercerita padanya tentang jelangung. Istrinya pergi ke rumah sebuah keluarga Tionghoa di Jatinegara bersama dengan empat orang lagi kawan-kawannya yang hendak bertanya pada jelangung di rumah itu.



Menurut cerita istrinya yang datang roh nenek anak-anak perempuan kecil yang memegang jelangkung itu. Istrinya bertanya apakah Halim akan menjadi anggota parlemen. Dan segera juga jelangkung itu mengangguk-angguk. Dan kini benar dia jadi anggota parlemen. Halim bukan orang yang percaya pada takhayul. Tapi kini dia agak bimbang juga sedikit. Kebetulan pada dirinya sendiri sungguh-sungguh terjadi.

(SDJ/KSS/BD/104)

Data 5 tersebut merupakan aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya tersebut tergambar dalam wacana pengarang. Mochtar Lubis sebagai pengarang menggambarkan budaya kepercayaan terhadap hal mistis yaitu jelangkung. Kepercayaan terhadap hal mistis berupa jelangkung masih kental di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 1950-an.

Halim sebagai pemilik percetakan surat kabar sangat diharapkan untuk menjadi anggota parlemen oleh istrinya. Istri Halim ikut turun tangan dengan mengunjungi keluarga Tionghoa di Jatinegara pemilik jelangkung untuk menanyakan nasib Halim di parlemen. Istri Halim masih mempercayai hal mistis seperti jelangkung. Menurut KBBi edisi V, jelangkung merupakan boneka orang-orangan yang dilengkapi alat tulis yang ditaruh pada ujung kayu palang. Jelangkung digunakan sebagai media untuk memanggil arwah dan arwah tersebut akan masuk ke dalam boneka jelangkung. Arwah yang sudah masuk dalam jelangkung dapat dilakukan tanya jawab dan arwah tersebut akan memberikan jawaban.

Istri Halim menanyakan nasib suaminya di kursi parlemen kepada jelangkung. Arwah yang memasuki jelangkung tersebut yaitu arwah nenek anak-anak perempuan kecil yang memegang jelangkung itu. Istri Halim langsung menanyakan nasib Halim di kursi parlemen. Jelangkung tersebut memberikan jawaban dengan mengangguk-angguk. Ternyata jawaban yang diberikan jelangkung tersebut terbukti benar. Istri Halim masih mempercayai praktik perdukunan.

Mempercayai hal-hal mistis dan perdukunan seperti istri Halim masih sering dilakukan masyarakat Indonesia pada masa itu. Barokah (2023) menyampaikan bahwa perpolitikan di Indonesia masih mempercayai dukun dapat meloloskan seseorang menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan umum, baik tingkat lokal maupun nasional. Beberapa individu mendatangi dukun untuk menemukan jawaban terkait peluang yang dimiliki dalam proses



pemilihan umum, serta meminta bantuan untuk memuluskan maksud dan tujuan dari individu tersebut.

Salah satu peran penting dalam budaya masyarakat tradisional adalah dukun. Peran dukun di tengah arus modernisasi masih tetap bertahan karena kepercayaan masyarakat pada kekuatan gaib (supranatural) yang masih mempengaruhi kehidupan. Peran dukun meliputi segala bidang kehidupan termasuk di bidang politik. Dukun di ranah politik memainkan peran penting tidak hanya aspek spiritualitas, akan tetapi menjadi pembicara ketika melakukan praktik.

Kegiatan mempercayai terhadap hal mistis ini sering terjadi di dunia perpolitikan Indonesia salah satunya yang pernah dilakukan oleh Soekarno pada masa menjabat sebagai presiden. Presiden Soekarno sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu menyambangi makan raja-raja Jawa di Kawasan Mamenang (Kediri) yang merupakan petilasan Prabu Jayabaya. Presiden Soekarno pernah melakukan upaya untuk memobilisasi kekuasaan melalui mantra dalam babad kuno. Selain itu, beberapa upacara ritual terlihat jelas dalam pertunjukan wayang di Istana Presiden dengan lakon yang dipilih langsung oleh Presiden Soekarno. Kegiatan lain yaitu pada masa menghadapi krisis Irian Barat pada periode tahun 1960. Presiden Soekarno melibatkan berbagai tokoh dan kelompok mistik dalam kampanye perebutan Irian Barat dari tangan Belanda. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya mempercayai hal mistis di Indonesia terutama dalam berpolitik sudah biasa terjadi. Budaya ini sering terjadi dalam berpolitik di tingkat lokal seperti pilkades, maupun berpolitik tingkat nasional seperti Presiden Soekarno pada masa kepemimpinannya.

Data 6 :

“Karena itu, maka kita telah menyediakan fonds perjuangan yang cukup besar, dan usaha ini akan kita mulai dengan mendirikan Gerakan Kebudayaan Rakyat, dan “Gekra” ini akan mengeluarkan majalah kebudayaan yang bersifat militan sekali. Saudara-saudara berempat yang saya undang kemari dimaksud untuk diajak supaya menjadi aktivis penuh bekerja di majalah ini yang akan kita keluarkan untuk sementara sekali sebulan. Tetapi di samping ini kita akan berusaha mendirikan cabang-cabang “Gekra” di mana-mana di seluruh tanah air, mengadakan pameran-pameran buku, seni lukis, sayembara-sayembara mengarang, organisasi sandiwara rakyat, menciptakan tari-tarian dan musik rakyat. Sungguh amat banyak



yang akan kita kerjakan, dan sebab itu saya harap kita dapat menyelesaikan persiapan semuanya ini dengan segera.”

(SDJ/KSS/BD/171)

Data 6 tersebut merupakan aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya tersebut tergambar dalam kalimat yang diucapkan Akhmad. Akhmad menggandeng penggiat seni yaitu Yasrin seorang penyair, Syafei seorang penyair rakyat, Murtoho seorang pelukis rakyat, dan Hambali seorang pengarang cerita pendek rakyat. Tujuan Akhmad menggandeng penggiat seni tersebut untuk mendirikan Gerakan Kebudayaan Rakyat (Gekra).

Akhmad mendirikan Gekra karena merasa tidak sejalan dengan Pranoto dan kawan intelektual lainnya. Akhmad menganggap Pranoto dan kawan lainnya sudah seperti kaum borjuis, tidak mementingkan kepentingan rakyat terutama di bidang seni dan kebudayaan. Rencana mendirikan “Gekra” yang dilakukan oleh Akhmad untuk memperjuangkan kebudayaan rakyat dan menghancurkan sisa-sisa kebudayaan feodal.

Janji Akhmad dalam mendirikan Gekra ini untuk membawa kemakmuran bagi rakyat, membawa kemakmuran untuk rakyat, dan penghapusan kelas-kelas masyarakat. Akhmad memiliki tujuan yang kuat untuk menghapuskan kaki tangan imperialis, kapitalis, dan sisa-sisa kaum feodal dan borjuis yang masih mandarah daging di golongan Pranoto. Akhmad juga mengepaskan sayap lebih lebar dalam bidang kebudayaan yaitu mengadakan pameran buku, seni lukis, mengarang, sandiwara, tarian dan juga musik. Rencana mendirikan Gekra ini sangat disusun secara rapi dan terstruktur oleh Akhmad supaya rencana mereka tidak mengalami kegagalan.

Akhmad sebagai tokoh dari golongan komunis memiliki tekad yang kuat untuk membentuk Gerakan Kebudayaan Rakyat (Gekra). Hal tersebut sama seperti yang pernah terjadi di Indonesia yaitu terbentuknya Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Yudiono (2007) menjelaskan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) berdiri pada 17 Agustus 1950 ditangan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Lekra sebagai organisasi penting dari partai tersebut memperjuangkan komunisme dengan semboyan kemakmuran rakyat berdasarkan penguasaan alat produksi di tangan kaum buruh dan petani sebagai kelompok besar yang tertindas oleh feodalisme dan kapitalisme.

Salah satu tokoh Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer dan Bakri Siregar yang terdokumentasikan dalam *Prahara Budaya* dapat dipahami sekilas pemikiran mereka tentang realisme sosialis dan dapat disimak dalam buku Pramoedya Ananta Toer. Widariyanti (2022) menjelaskan perkembangan Lekra



yang ditunggangi politik ideologinya membuat Lekra agresif dan radikal hingga terjadi Peristiwa 30 September 1965 dan menyebabkan organisasi ini dibubarkan. Para anggota Lekra banyak yang diasingkan dan tidak diadili, salah satunya yaitu Pramoedya Ananta Toer.

Konteks Sejarah

Data 7 :

Jelas pula, bahwa memuncaknya serangan-serangan oposisi terhadap pemerintah dan pribadi beberapa menteri di dalam kabinet dilakukan pada saat-saat menjelang perdebatan tentang Irian Jaya di PBB. Kegiatan ini sesuai dengan kegiatan-kegiatan pihak Belanda yang memburuk-burukkan nama Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud supaya menggagalkan perjuangan Indonesia mendapat Irian Jaya kembali di forum internasional. Sampai ke mana ada hubungan gerakan-gerakan oposisi dan pers oposisi ini dengan kegiatan pihak Belanda ini, kiranya dapat pula diambil kesimpulan sendiri-sendiri oleh pembaca. Sungguh amat disayangkan ada orang-orang Indonesia yang didorong nafsu hendak menjatuhkan kabinet ini telah bersedia menjual diri mereka kepada kuasa asing.

(SDJ/KSJ/225-226)

Data 7 tersebut merupakan konteks sejarah. Konteks sejarah tersebut terdapat pada frasa “perdebatan tentang Irian Jaya di PBB”. Peristiwa perdebatan atau perebutan Irian Jaya ini sesungguhnya memang terjadi dan Mochtar Lubis sebagai pengarang mampu untuk mencerminkan keadaan di sekitarnya. Peristiwa perdebatan Irian Jaya terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Husein (2022) dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia meliputi Irian Jaya yaitu Irian Barat. Irian Barat merupakan wilayah provinsi terluas di Indonesia dan mengandung sumber daya alam bidang pertambangan yaitu tembaga dan emas. Hal ini yang menjadikan Irian Barat tidak diperbolehkan masuk wilayah Indonesia oleh Belanda. Belanda ingin menguasai Irian Barat sebagai koloninya. Proses pembebasan Irian Barat membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Proses pembebasan Irian Barat ini dilakukan dengan diplomasi dan diimbangi dengan kekuatan militer. Berbagai jalan ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayah Irian Barat.

Belanda bersikeras untuk merebut wilayah Irian Barat melalui Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Melalui Perjanjian Linggarjati



tersebut Belanda hanya mengakui secara *de facto* wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura. Mengacu dari perjanjian tersebut, pada Desember 1946-1947, Belanda membentuk Negara Indonesia Timur dan Belanda berubah dalam diplomasi politiknya dengan memberi ultimatum ke Indonesia supaya kedaulatan Belanda diakui di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut ditolak Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya Agresi Militer Belanda I.

Perjanjian Linggarjati tidak membuahkan hasil sehingga diadakan perjanjian Reville pada tahun 1948. Isi perjanjian ini Indonesia diminta untuk mengakui Garis Van Mook atau garis khayal yang digunakan untuk membatasi wilayah Irian Barat. Namun, Indonesia menolak hal tersebut sehingga Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II. Perjanjian Reville tidak membuahkan hasil sehingga ditempuh Persetujuan Roem Royen pada tanggal 17 April 1949, namun tetap tidak membuahkan hasil.

Diplomasi yang dilakukan selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda belum melepaskan Irian Barat dan menjanjikan melepaskan Irian Barat dalam waktu satu tahun. Pada tanggal 19 Desember 1961 Soekarno mengumumkan pelaksanaan Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Trikora bertugas untuk melaksanakan perjuangan Pembebasan Irian Barat secara resmi. Adanya Trikora membuat Belanda merasa terdesak dan menyatakan kesediaan untuk berunding dengan Indonesia. Perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962. Berdasarkan Perjanjian New York, maka pada tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969 diselenggarakan Pepera (penentuan pendapat rakyat). Melalui musyawarah ini rakyat Irian Barat bersatu dan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama rangkaian peristiwa pembebasan Irian Barat, Mochtar Lubis menuangkan pandangannya terhadap sikap orang-orang Indonesia pada orang asing (Belanda). Mochtar Lubis menyampaikan bahwa terdapat perilaku orang-orang Indonesia yang ikut dalam rencana Belanda untuk memberikan wilayah Irian Barat kepada Belanda. Terdapat pula hubungan kegiatan yang dilakukan oposisi dan pers oposisi dengan rencana kegiatan Belanda.

Melalui kalimat "Sungguh amat disayangkan ada orang-orang Indonesia yang didorong nafsu hendak menjatuhkan kabinet ini telah bersedia menjual diri mereka kepada kuasa asing" Artinya, ada beberapa orang-orang Indonesia yang mendukung Belanda, menjatuhkan pemerintah Indonesia, dan bersedia untuk menyerahkan Irian Barat kepada Belanda. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Mochtar Lubis sebagai pengarang.



E. PENUTUP

Mochtar Lubis berhasil mencerminkan realitas sebenar-benarnya keadaan sosial masyarakat di Jakarta pada masa tersebut. Mochtar Lubis berhasil membidik permasalahan sosial politik yang menjadi dominan permasalahan di Indonesia pada tahun 1950-an atau masa pemerintahan Orde Lama. Sehingga, menurut teori Georg Lukacs, Mochtar Lubis sebagai pengarang novel *Senja di Jakarta* merupakan pengarang yang realis sejati karena mampu menggambarkan keadaan sosial politik di Indonesia pada tahun 1950-an di novel *Senja di Jakarta*.

Novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis memiliki implikasi dengan dunia pendidikan khususnya pada pembelajaran sastra. Berkaitan dengan kurikulum yang dipakai, sekolah saat ini menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka di dalamnya mencantumkan pembelajaran yang berkaitan dengan novel pada jenjang SMA kelas XI. Novel *Senja di Jakarta* karya Mochtar Lubis dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra membantu untuk menemukan konteks sosial dan konteks sejarah dalam novel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2016). Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 96286.
- Bachtiar, T. A. (2016). Muatan Nilai Islam dalam Penulisan Dan Pengajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 201-218.
- Baihaqi, I. (2015). Resepsi Cerita Perang Bubat dalam Novel Niskala Karya Hermawan Aksan. *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, vol. 11, no. 2, 2015, pp. 61-71. DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/transformatika.v11i2.100.g67>
- Barokah, F. (2023). Mistisisme Politik: Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1-19.
- Hadi, Abdul. (2021, 12 Oktober). *Sejarah Tritura & Gerakan Mahasiswa Tumbangkan Orde Lama*. Tirto.id. <https://tirto.id/sejarah-tritura-gerakan-mahasiswa-tumbangkan-orde-lama-erMo>.



- Husein, H. (2022). Konflik Indonesia-Belanda: Upaya Mengembalikan Irian Jaya Kedalam Pangkuan Ibu Pertiwi. *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah UNINDRA*, 1(1).
- Karyanto, I. (1997). *Realisme Sosialis Georg Lukacs*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khoiruyah, D.N., Sutrimah, & Noeruddin, A. (2021). "Analisis Aspek-Aspek Sosiologi Sastra Dalam Novel *Sehidup Sesurga Denganmu* Karya Asma Nadia Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA". *Jurnal Pendidikan Edutama*.
- Kochhar, S. K. (2008). *Pembelajaran Sejarah*. Jakarta: Grasindo.
- Kuntowijoyo. (1995). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lubis, Mochtar. (2018). *Senja Di Jakarta*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Santoso, Topo dan Perludem Tim. (2012). *Pemilukada Pengalaman dan Penataan Kembali, dalam: Konpress, Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-104.
- Sholehuddin, A. & Kasdi, A. (2015). *Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin*.
- Widariyanti, C. (2022). Eksistensi Lekra Dalam Pusaran Manifesto Kebudayaan Demokrasi Terpimpin. *ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 18(1).
- Wildan, Harun, M., & Safrida, Y. (2015). *Fakta Sejarah dalam Novel Perempuan Keumala Karya Endang Moerdopo*. Cendekia, 25-36.
- Yudiono K.S. (2007). *Pengantar Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.



Zahiroh, Najma. (2020). Pergolakan Santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 1965-1967. *Jurnal AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 9(2).